

# Pansus PDAM Mulai Bekerja

## LHP BPK Jadi Rujukan

**SUNGAI RAYA**—Meskipun baru akan disahkan Senin ini, seperti Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDAM Kubu Raya mulai bekerja dalam menyoroiti catatan di tubuh PDAM Tirta Raya seperti tertuang dalam LHP BPK RI tahun 2011.

"Kita bekerja ekstra, sejak pansus dibentuk. Beberapa catatan LHP BPK RI harus mendapatkan jawaban manajemen PDAM Kubu Raya. Kalau membandel kita proses selain melalui pansus dan rekomendasi ke aparat penegak hukum," ungkap mantan Ketua Panja, Jupri didampingi tim Bambang Sridadi kemarin.

Menurut dia beberapa catatan LHP BPK RI harus mendapatkan penjelasan standar. Misalnya soal aset Pemkab Kubu Raya di PDAM Tirta Raya belum diakui sebagai penyertaan modal termasuk di dalamnya hibah Pemprov Kalbar dan Kubu Raya sebesar Rp20,667 miliar. Lalu penyerahan kekayaan pemerintah dipisahkan dari penyerahan PDAM Mempawah ke Kubu Raya sebesar Rp385 juta belum diakui sebagai investasi.

Catatan lain, lanjut dia, kekayaan pemerintah daerah dipisahkan dari Pemkab Kubu Raya sebesar Rp735 juta belum diakui statusnya. Dan penyertaan pemerintah dari PDAM Tirta Raya Rp2,96 miliar juga belum jelas statusnya.

Bahkan, pada tahun 2010, PU Kalbar pernah mengadakan aset ke PDAM Tirta Raya sebesar Rp12.3 miliar, namun mekanisme penyerahan tidak melalui Pemkab Kubu Raya. Sehingga berpotensi tidak tercatat dalam nilai investasi Kubu Raya. Dan status kepemilikan tidak jelas karena terjadi selisih Rp530 juta dan belum dapat dijelaskan.

Di tahun 2010-2011 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya merealisasikan belanja modal pengadaan aset PDAM Tirta Raya dibiayai APBD 2010 dan 2011 senilai Rp4,79 Miliar. Sementara status kepemilikannya belum jelas.

Sujiwo mengatakan pansus PDAM dikukuhkan sesuai paripurna panja dihadiri sebanyak 23 dari 45 anggota DPRD Kubu Raya. Itu berarti lebih dari 2/3 atau setengah personil wakil rakyat hadir dalam persidangan. Enam dari tujuh fraksi (PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, DKS dan RKNR) terkecuali PAN menyetujui membentuk panitia khusus PDAM. "PAN belum dapat memberikan pendapatnya

karena pimpinan fraksi tidak hadir di sidang," kata M. Roqib anggota Fraksi PAN Kubu Raya kemarin.

Kata dia dengan ketuk palu pansus PDAM, ada beberapa hal perlu diluruskan, diperbaiki dan saling sumbangsih pendapat terkait LHP BPK RI mengenai PDAM Tirta Raya Kubu Raya. Namun, kalau tidak bisa dibendung, dengan sangat terpaksa dewan melalui pansus bisa merekomendasikannya ke yudikatif (kepolisian atau kejaksaan). "Tetapi itu jalan terakhir," ungkapnya. Ia menerangkan pembentukan pansus ini bukan ajang unjuk gigi ke pemerintah daerah terkait persoalan PDAM Kubu Raya. Namun pansus perlu mempertanyakan pendalaman terkait LHP BPK RI. Apalagi sepertinya kontribusi PDAM ke daerah juga patut dipertanyakan dalam bentuk PAD. "Padahal kita sudah banyak memberikan dukungan anggaran sejak PDAM terbentuk tahun 2010 lalu. Dukungan itu beragam dari anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Jumlahnya juga mencapai puluhan miliar rupiah," tandas dia.

Lebih jauh dikatakannya dalam rapat panja beberapa waktu lalu, ternyata Plt Direktur PDAM sudah dimintai untuk hadir. Sayangnya ada bersangkutan tidak hadir. Padahal ada beberapa persoalan di PDAM berdasarkan LHP BPK RI perlu

diluruskan. Salah satunya perda PDAM sudah dibentuk setahun lalu tetapi direktur definitif dan dewan pengawas sampai sekarang belum disahkan. "Sementara kita tahu PDAM buat memenuhi hajat hidup orang banyak. Ini yang perlu dibedah kembali," ucapnya. Sujiwo menambahkan LHP BPK RI terkait PDAM Tirta Raya kalau tidak disikapi cepat bisa menjadi kronis dan temuan. Dewan sendiri memandang pengelolaan PDAM sekarang ini dalam kondisi kurang sehat. Sebab, dalam tempo waktu 4 tahun berjalan perbaikan manajemen dan banyaknya bantuan ternyata menjadi catatan LHP BPK RI.

"Mau tidak mau, kepala daerah harus mengambil sikap dan langkah tegas. PDAM adalah pelayan warga dalam bentuk air. Kalau dikelola akan menjadi PAD potensi. Sebab warga membayar dan tidak akan keberatan selama pelayanannya baik," katanya seraya memohon maaf kepada kepala daerah kalau DPRD akan mengambil langkah tegas untuk perbaikan PDAM itu sendiri.

Dikonfirmasi terpisah berkali-kali tetap saja Pelaksana Tugas Kepala PDAM Tirta Raya Kubu Raya Gandhi Satyagraha melalui nomor pribadinya tidak membalas telepon. Sementara pesan pendek yang dikirim sebagai bahan konfirmasi juga tidak pernah dibalas. (den)